

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP MUTU PENDIDIKAN

DI ACEH SINGKIL

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NINGRUM
NIM. 180801050

**Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ningrum
Nim : 180801050
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Sumber Mukti, 07-02-2000
Alamat : Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Aceh Singkil

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN-Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 November 2023

Yang Menyatakan



NINGRUM

NIM. 180801050

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP MUTU PENDIDIKAN
DI ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Politik

Oleh :

NINGRUM
NIM. 180801050

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk Diuji/dimunaqasahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Eka Januar, M.Soc. Sc

NIP. 198401012015031003



Renaldi. Safriansyah, S.E., M.HSc.

NIDN. 2007017903

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP MUTU PENDIDIKAN

DI ACEH SINGKIL

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Ranirydan Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir UntukMemperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

Diajukan Oleh:

Ningrum

NIM. 180801050

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Desember 2023

1 Jumadil Akhir 1445 M

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua



Eka Januar, M.Soc. Sc.

NIP.198401012015031003

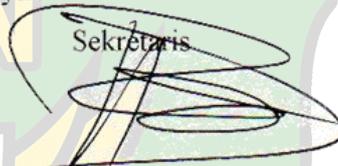
Penguji I



Dr. Muji Mulia, S.Ag.,M.Ag

NIP.197403271999031005

Sekretaris



Renaldi Safriansyah, M.H.Sc.,M.P.M

NIP.197901072023211003

Penguji II



Ramzi Murziqin, S.H.I.,M.A.

NIP. 198605132019031006

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag.,M.Ag

Nip.197403271999031005

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis panjatkan atas keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul *“Kebijakan Pemerintah Terhadap Mutu Pendidikan di Aceh Singkil”*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Terima Kasih Kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Prof. Dr.Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Muji Mulia, S.Ag. M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
4. Rizkika Lhena Darwin M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Ramzi Murziqin, MA. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik.
5. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Eka Januar. M.Soc. Sc selaku Pembimbing I dan Bapak Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kedua orang Tua Tercinta, Kakak-kakak, Adik-adik dan Keluarga Besar

yang telah mendoakan dan menyemangati, baik dari segi material maupun nonmaterial.

7. Terima kasih kepada teman-teman, Fajar M Sidiq S.Pd, Elma Nurma Firoh S.Pd, Tina Ervianti, Muna Wahyuni S.Pd, Melia Rinita S.AP, Ilmu Politik angkatan 2018 terutama Jesika Metiara Fitri S.I.P, Laila Sapuan S.I.P, Mikial Bulkia S.I.P, yang telah banyak membantu, memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada informan yang telah banyak membantu peneliti untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 14 Desember 2023

Penulis,

Ningrum

NIM. 180801050

ABSTRAK

Perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan komitmen Pemerintah Indonesia yang diterapkan melalui berbagai kebijakan. Pendidikan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak terutama pendidikan dasar. Selain membahas tentang pendidikan sebagai suatu hak, dan juga mempertegas bahwa pendidikan (terutama pendidikan dasar) merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya. Aceh Singkil termasuk kabupaten dengan mutu pendidikan yang tergolong masih rendah ini menjadi salah satu faktor Aceh Singkil menjadi kabupaten termiskin di Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Singkil. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mutu guru di Aceh Singkil masih kurang mulai dari guru PNS, guru tersertifikasi maupun guru lulusan S1, sedangkan mutu siswa jika dilihat dari hasil nilai ujian akhir masih rendah dibandingkan rata-rata nilai provinsi Aceh. Fasilitas sekolah masih banyak yang belum memadai, mulai dari belum tercukupinya ruang kelas, minimnya buku diperpustakaan, peralatan lab yang tidak ada, Kondisi ini akan berpengaruh terhadap ketidaknyamanan proses belajar, ketidaklayakan sekolah. Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Singkil yaitu melalui program-program untuk mendukung pendidikan mulai dari sarana dan prasarana, membantu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) guru, meningkatkan kualitas pendidikan, proses pendidikan di Aceh Singkil, dan juga memberikan dukungan berupa program-program untuk menunjang meningkatnya nilai dan prestasi siswa.

Kata Kunci: kebijakan, pemerintah dan mutu pendidikan, Aceh Singkil.

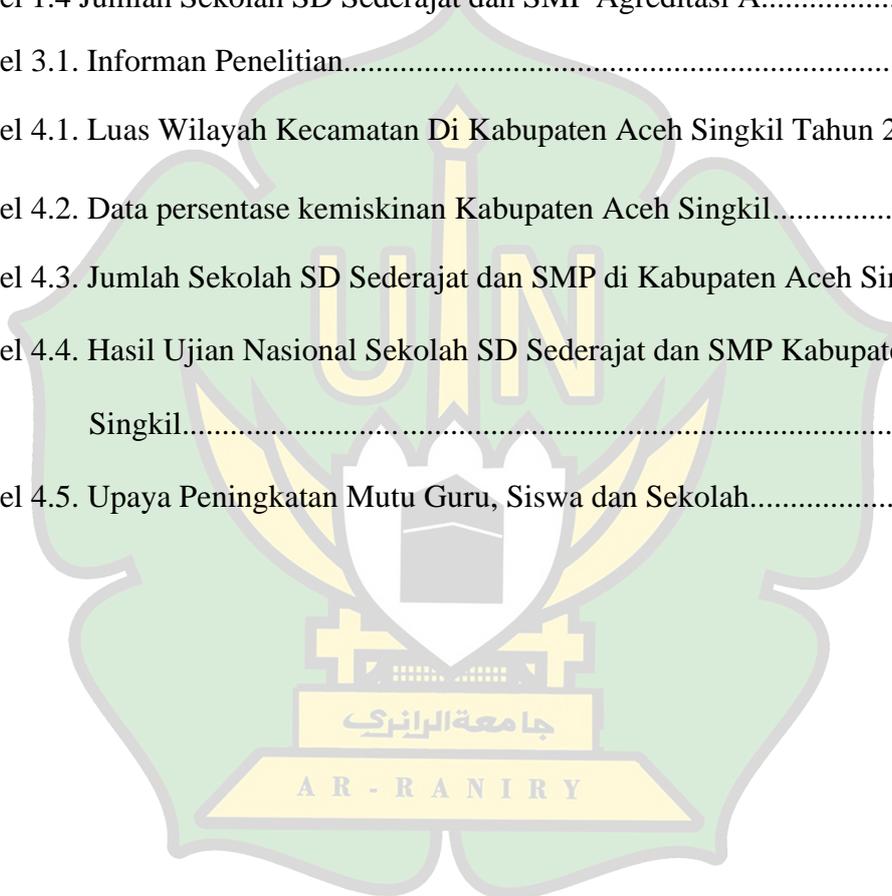
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTARK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	
2.1. Pembahasan Penelitian Yang Relevan.....	10
2.2. Landasan Teori	13
2.2.1. Teori Kebijakan.....	13
2.2.2. Pemerintah.....	17
2.2.3. Mutu Pendidikan	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	26
3.2. Fokus Penelitian.....	27
3.3. Lokasi Penelitian.....	27
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	27
3.5. Informan Penelitian.....	28

3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6.1. Wawancara.....	30
3.6.2. Observasi	31
3.6.3. Dokumen.....	31
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	31
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Singkil.....	32
4.1.1. Kondisi Sosial, Ekonomi, Masyarakat Aceh Singkil	34
4.1.2. Profil Singkat Dinas Pendidikan Aceh Singkil	36
4.1.3. Profil Pendidikan Aceh Singkil.....	39
4.1.3.1. Mutu Guru	39
4.1.3.2. Mutu Siswa	44
4.1.3.3. Mutu Sekolah	43
4.2. Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Di Aceh Singkil.....	52
4.2.1. Meningkatkan Mutu Sekolah.....	53
4.2.2. Meningkatkan Mutu Guru.....	55
4.2.3. Meningkatkan Mutu Siswa.....	57
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	69

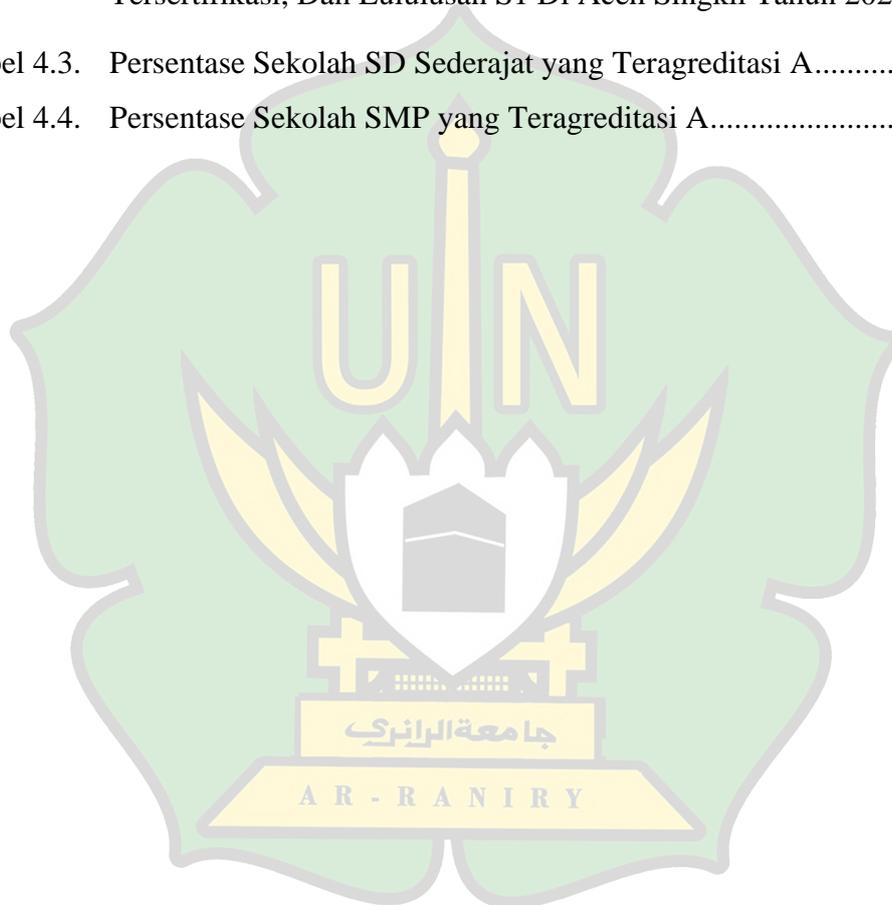
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Guru SD Sederajat Di Aceh Singkil.....	5
Tabel 1.2 Persentase Guru SMP Di Aceh Singkil.....	5
Tabel 1.3 Rata-Rata Lama Sekolah.....	6
Tabel 1.4 Jumlah Sekolah SD Sederajat dan SMP Agreditasi A.....	6
Tabel 3.1. Informan Penelitian.....	29
Tabel 4.1. Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 ...	33
Tabel 4.2. Data persentase kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil.....	35
Tabel 4.3. Jumlah Sekolah SD Sederajat dan SMP di Kabupaten Aceh Singkil	38
Tabel 4.4. Hasil Ujian Nasional Sekolah SD Sederajat dan SMP Kabupaten Aceh Singkil.....	46
Tabel 4.5. Upaya Peningkatan Mutu Guru, Siswa dan Sekolah.....	52



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Data Jumlah Guru/Tenaga Didik SD Sederajat Berstatus PNS dan Swasta, Tersertifikasi, Dan Lulusan S1 Di Aceh Singkil Tahun 2022	40
Grafik 4.2. Data Jumlah Guru/Tenaga Didik SMP Berstatus PNS dan Swasta, Tersertifikasi, Dan Lulusan S1 Di Aceh Singkil Tahun 2022.....	41
Tabel 4.3. Persentase Sekolah SD Sederajat yang Teragreditasi A.....	49
Tabel 4.4. Persentase Sekolah SMP yang Teragreditasi A.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Politik adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses memerintah dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga/institusi, tujuan negara atau pemerintahannya. Ilmu politik dalam suatu negara (state) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*).¹ Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh pemerintah, dalam perspektif politik, sosial, budaya dan ekonomi. Pendidikan harus mampu mengembangkan kapasitas individu untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizens*), yang memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hubungan antara pendidikan dan politik bukan sekedar hubungan saling mempengaruhi, tetapi hubungan fungsional, keberhasilan pendidikan bagi sebuah bangsa sangat tergantung dengan keseriusan politik pemerintah, apabila sistem politik yang dipergunakan oleh negara tersebut stabil, maka kualitas outcome pendidikan pun lebih baik dan sebaliknya.² Pasca reformasi 1998 dan desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola

¹ Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal 14

² Galih ramadhan nugroho putra, politik pendidikan, (jakarta: yayasan pustaka obor indonesia, 2016), hal 31

sektor pendidikan, selain itu juga diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangan dalam mutu pendidikan.³

Keberadaan pendidikan yang sangat penting telah diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) yang menyebutkan bahwa, "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Hak memperoleh pendidikan ini diperjelas dengan pasal 31 (2) yang bunyinya "Setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Selanjutnya pada ayat (3) dituangkan pernyataan yang berbunyi. "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak terutama pendidikan dasar. Selain membahas tentang pendidikan sebagai suatu hak, pasal 31 juga mempertegas bahwa pendidikan (terutama pendidikan dasar) merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya.⁴

Dalam realitasnya, sampai saat ini dunia pendidikan kita juga masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Tidak adanya fasilitas dan dana yang cukup yang disediakan oleh pemerintah merupakan kendala besar dan menyebabkan pendidikan di Indonesia kurang memadai. Selain

³Safriansyah, R. 2021. Sub-National Innovation Policy: A Universal Entitlement To Education Grant In Sabang, Indonesia. AL-IJTIMA'I: International Journal of Government and Social Science. 7 (1): 29-40

⁴Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31

itu, pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan masih sangat minim, hal ini menyebabkan negara kita jauh tertinggal dari negara-negara lain.

Selanjutnya dasar filosofikal dan konstitusional pembangunan sumber daya manusia Indonesia, pada alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan secara tegas bahwa: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.⁵

Perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan komitmen Pemerintah Indonesia yang diterapkan melalui berbagai kebijakan. Pendidikan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama dari berbagai pihak. Adapun tahapan dari penjaminan mutu dimulai dari penetapan standar mutu, pemenuhan standar, pengukuran dan evaluasi dengan cara pengumpulan data dan analisis, perbaikan dan pengembangan standar dalam peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada acuan mutu pendidikan, yakni standar pelayanan minimal, standar pendidikan nasional dan standar mutu pendidikan yang melampaui standar pendidikan nasional.

Sistem penjaminan mutu pendidikan diatur dalam Peraturan menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan mutu pendidikan. Dalam permendiknas itu disebutkan Penjaminan

⁵Muhardi, *Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia*, vol XX No. 4 Oktober-Desember

mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggaraan satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.⁶

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 182 mengamanatkan bahwa paling sedikit 30 persen dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dibelanjakan untuk pendidikan.⁷ Implementasi ketentuan ini perlu disiapkan secara matang agar pengalaman di waktu yang lalu tidak terulang di mana alokasi dana pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang otonomi khusus sebelumnya (UU No. 18 Tahun 2001) tidak tepat sasaran dan tidak memperlihatkan hasil nyata dalam hal peningkatan pelayanan pendidikan dan lebih jauh lagi dampak terhadap ekonomi masyarakat. Belum adanya Rencana Strategis Pendidikan Aceh yang sesuai dengan cita-cita adanya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.⁸ Sebelumnya juga aceh adalah salah satu provinsi yang mendapatkan layanan bantuan guru terutama daerah yang tergolong terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) ini adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan layanan pendidikan, dan sampai program ini telah dihapus oleh pemerintah.

Aceh singkil termasuk kabupaten dengan mutu pendidikan yang rendah yang menyebabkan Aceh Singkil menjadi kabupaten termiskin di Aceh. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Singkil mencatat presentase kemiskinan dikabupaten

⁶ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009

⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006

⁸ UU No. 18 Tahun 2001

masih berada pada angka 20,20 persen atau sekitar 25 ribu orang lebih dari total penduduk sebanyak 126,514 jiwa. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Kemendikbud, Aceh Singkil menunjukkan mutu pendidikan yang masih belum terpenuhi rata-rata hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah:⁹

Tabel 1.1

Persentase Guru SD Sederajat Di Aceh Singkil

Indikator	Persentase Guru
Guru Lulusan S1	94,4%
Guru pns	49,7%
Guru tersertifikasi	27,2%

Tabel 1.2

Persentase SMP Sederajat Di Aceh Singkil

Indikator	Persentase Guru
Guru Lulusan S1	99,0%
Guru pns	43,4%
Guru tersertifikasi	20,9%

⁹ Kemendikbud, Neraca Pendidikan Daerah 2022.com, Kab. Aceh Singkil, Diakses melalui situs: <https://npd.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 20 oktober 2022, puku 11.35 wib

Tabel 1.3

Rata-rata Lama Sekolah

Tahun	Aceh Singkil	Aceh
2021	8,68	9,37
2022	8,69	9,34

Tabel 1.4

Jumlah Sekolah SD Sederajat dan SMP Akreditasi A

Indikator	Persentase
SD Sederajat	5,41%
SMP	19,89%

Mutu pendidikan di Aceh Singkil sangat membutuhkan perhatian, permasalahan mutu pendidikan ini ditimbulkan oleh beberapa sebab yaitu mutu guru ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, ini adalah salah satu faktor penting dalam mempengaruhi pendidikan adalah tenaga pendidik yang tidak memadai di setiap jenjang pendidikan di Aceh Singkil sehingga banyaknya sekolah yang memang masih sangat banyak kekurangan tenaga pendidik seperti guru yang belum berferivikasi, guru PNS dan guru sudah S1namun mengajar tidak sesuai bidangnya.¹⁰ Karena mutu guru yang masih kurang ditakutkan akan berpengaruh terhadap mutu siswa,

¹⁰Aceh Jurnal Nasional Network, Sarjana Bukan Jurusan Keguruan Bisa Mndaftar PPL Guru di Aceh Singkil,, Diakses melalui situs: <https://www.ajnn.net/news/sarjana-bukan-jurusan-keguruan-bisa-mendaftar-pppk-guru-di-aceh-singkil/index.html>, diakses pada tanggal 7 maret 2022

mutu siswa akan baik jika mutu guru juga baik, kompetensi nilai lulusan merupakan kualifikasi pendidikan yang harus dipenuhi dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Minimnya tenaga pendidik ini terkadang menjadikan guru yang tidak sesuai keahlinya menjadi mengajar supaya anak-anak tetap bisa sekolah, penumpukan guru di UPTD tertentu juga salah satu sebab kurangnya pendidik di beberapa sekolah dan juga letak sekolah yang sulit dijangkau, dimana banyak sekolah yang berada ditempat jauh dari kota, dan harus menyebrang untuk kesana, pasalnya tuntutan mengajar seorang guru, selain itu hambatan masalah minimnya sarana prasarana penunjang proses pembelajaran didarah terpencil. prasarana dan sarana belajar yang belum tersedia dan belum didayagunakan secara optimal, pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran dan proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif.¹¹

Selanjutnya beberapa Kondisi sekolah di Aceh Singkil yang sangat memprihatinkan seperti ketersediaan alat-alat pengajar dan karena faktor jauh lokasinya sehingga kurangnya perhatian dari pemerintah, aspek fisik tersebut berupa antara lain dapat dilihat dari ketersediaan bangku serta meja belajar, perpustakaan sekolah dan juga kurang meratanya buku-buku diperpustakaan, Selain kondisi fasilitas yang demikian, juga banyak ruang belajar dan sarana belajar lain seperti laboratorium, sarana olahraga yang rusak. ini juga yang menyebabkan mimimnya guru-guru yang tidak mau dan tidak betah mengajar di tempat ini sehingga pembelajaran kurang maksimal, karena penyebab mutu guru

¹¹Top Metro News, Pendidikan Rendah Menjadi Faktor Utama Aceh Singkil Miskin, Diakses melalui situs: <https://topmetro.news/71245/mutu-pendidikan-rendah-jadikan-aceh-singkil-kabupaten-termiskin/> diakses pada tanggal 30 november 2022

dan mutu siswa mengakibatkan akreditasi disekolahan tersebut juga tidak baik ataupun tertinggal.¹²

Faktor mutu pendidikan ini menyebabkan pendidikan di Aceh Singkil menjadi persoalan yang terus harus diperhatikan oleh pemerintah, Untuk mencapai mutu pendidikan yang sesuai dengan yang diinginkan maka pemerintah harus meningkatkan profesionalisme guru. Pemerintah Kabupaten Aceh peningkatan mutu pendidikan harus sangat memperhatikan masalah profesionalisme guru. Guru yang profesional harus mampu menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Dalam hal pendidikan, masalah pendidikan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil tidak terlepas dari permasalahan profesionalisme guru dan mutu sekolah. Guru seringkali mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya saat proses belajar mengajar sedang berlangsung sehingga permasalahan mutu, jadi untuk itu peneliti ingin meneliti tentang Kebijakan Pemerintah terhadap Mutu Pendidikan di Aceh Singkil.

Hipotesa awal saya adalah, penelitian ini terjadi diakibatkan adanya beberapa sebab pertama kurangnya peran pemerintah terhadap mutu pendidikan di Aceh Singkil sehingga mutu pendidikan di Aceh Singkil masih sangat rendah, yang kedua masih kurangnya tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan bidangnya sehingga tidak terealisasi dengan baik atau karena penumpukan guru yang karena faktor geografis di Aceh Singkil.

¹²Serambinews, Potret Dunia Pendidikan di Aceh Singkil, diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2020/01/05/potret-dunia-pendidikan-di-aceh-singkil-mereka-terpaksa-menulis-sambil-jongkok-di-lantai-kelas>, pada tanggal 7 november 2022

1.2. Rumusan masalah

Dari penjelasan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Aceh Singkil ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya uraikan di atas, maka adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis Kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Singkil?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penambah wawasan mengenai Kebijakan pemerintah terhadap mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Menambah pengetahuan Khususnya masukan dan pengembangan referensi penelitian politik bagi fakultas Ilmu Sosila dan Ilmu Pemerintahan.
3. Dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan mutu pendidikan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pembahasan Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa referensi sebagai bahan pertimbangan data dan informasi dari penelitian tersebut:

Pertama, Skripsi Husnul Istiqamah judul “Inovasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Gowa” (Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar). Penelitian ini ingin menggambarkan mengenai inovasi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam bidang peningkatan profesionalisme guru di Kabupaten Gowa. Masalah pendidikan yang tidak dapat dipisahkan adalah masalah guru. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh karena itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi para siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap perubahan-perubahan dalam pengorganisasian kelas, penggunaan metode belajar, serta strategi belajar mengajar. Segala bentuk kebijakan dalam bidang pendidikan yang diambil oleh pemerintah merupakan sebuah ciri akan usaha peningkatan mutu pendidikan seperti pemberian pelatihan guru, bantuan sarana dan prasarana dan juga pemberian bimbingan belajar peserta didik di luar jam pelajaran.

Kedua, Skripsi Ainuddin Mukhlis judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat Dieng Wetan Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo” (Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang), penelitian ini menggambarkan bahwa pendidikan masyarakat Dieng masih berpendidikan rendah, sekitar 1357 jiwa atau 62,53% masyarakat Dieng tingkat pendidikannya SD, tidak pernah sekolah, hanya terdapat 22 jiwa atau 1,01% saja dari jumlah penduduk Desa Dieng Wetan yang melanjutkan sampai jenjang Akademi dan Perguruan Tinggi. Faktor yang mempengaruhi rendahnya pendidikannya antara lain faktor motivasi individu, faktor motivasi orang tua, dan faktor budaya. Faktor sosial tidak begitu berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Sedangkan faktor kondisi ekonomi keluarga dan faktor aksesibilitas tidak mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Ketiga, Skripsi Muhammad Abdullah judul “Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemerataan Guru Pns Pada Jenjang SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul” (Jurusan Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta), penelitian ini membahas tentang mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS, mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat, dan mendeskripsikan upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS pada jenjang SD di dinas pendidikan kabupaten Bantul, implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS meliputi tiga tahap yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

Tahap pengorganisasian berupa adanya team khusus dari dinas yang bertugas menganalisa data kebutuhan guru yang telah diserahkan oleh sekolah. Tahap interpretasinya yaitu dinas telah melakukan sosialisasi ke sekolah sekolah terkait kebijakan yang akan diimplementasikan. Tahap aplikasinya yaitu sekolah mengumpulkan data kebutuhan guru dan diserahkan ke dinas, kemudian dari dinas yang menentukan hasil analisa. Faktor pendukung implementasi yaitu komunikasi yang baik antara dinas dengan sekolah. Faktor penghambatnya yaitu guru dan sekolah yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut Pemerintah. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang muncul yaitu dengan membuat aturan yang ditujukan kepada sekolah terkait pengangkatan guru. Mekanisme awal dari penataan dan pemerataan guru PNS di jenjang SD Negeri di dinas pendidikan kabupaten Bantul yaitu dinas mengirimkan surat edaran ke setiap sekolah untuk melakukan pendataan kebutuhan guru yang mencakup jumlah guru, kekurangan guru, kelebihan guru, jumlah rombel, dan lain-lain, dari sini dinas dapat melihat data sekolah mana yang mengalami kekurangan guru, ataupun sekolah mana yang mengalami kelebihan guru.

Keempat, Afdarina, judul “Peran Pemerintah Dalam peningkatan mutu pendidikan anak usia dini studi kasus kecamatan muara bulian” (prodi ilmu pemerintahan, fakultas syariah), Keberadaan pendidik sangat diperlukan sebagai sumber daya manusia dalam menunjang proses pendidikan anak usia dini di Kabupaten Batang Hari Kecamatan Muara Bulian sangatlah penting Guru dan tenaga pendidik PAUD sebagai mediator kepada peserta didik haruslah seorang yang berkarakter, memiliki kompetensi, kompeten dan kompetitif, Guru PAUD

harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang di persyaratkan sesuai degan Permendikbud No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD pada bab VII pasal 24 disebutkan bahwa pendidik anak usia dini terdiri dari Guru Inti, Guru Pendamping dan Guru Pendamping Muda.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Kebijakan

Istilah kebijakan dalam bahasa inggris policy, Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Kebijakan publik merupakan kwenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat).¹³

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu sosial politik, ekonomi, dan hukum. Namun istilah ini mungkin juga untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus, kebijakan pemerintah tentang Debirokratisasi dan Deregulasi.

¹³Mustari Nuryati. *Pemahaman Kebijakan Publik*, (Yogyakarta:P T Leutika Nouvalitera:2015), hal 2

Menurut Charles O. Jones istilah kebijakan (*policy*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standar, proposal dan grand design. Namun demikian, meskipun kebijakan publik mungkin kelihatan atau mungkin dapat dipandang sebagaisesuatu yang terjadi terhadap seseorang, namun sebenarnya sebagaimana beberapa contoh yang telah disebutkan terdahulu pada dasarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Beberapa definisi public policy (kebijakan pemerintah, kebijaksanaan negara, kebijakan publik:

Thomas R. Dye, dalam "Understanding Public Policy", menyatakan bahwa public policy itu adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government chooses to do or not to do*). Dengan kata lain, isi public policy itu tidak hanya pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk pula apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah, termasuk misalnya "mengatur konflik".¹⁵ Tegasnya, public policy itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan atau berorientasi

¹⁴Abdoellah, Rusfiana. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*, (Jatinangor: Alfabeta:2016), Hal 18

¹⁵ Dr, Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta: 2016), Hal 1

pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Pengertian ini mengandung implikasi:

1. Bahwa kebijakan pemerintah itu dalam bentuk perdananya merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijakan pemerintah itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
3. Bahwa kebijakan pemerintah balk untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijakan pemerintah itu harus senantiasa ditujukan pada kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Dalam kaitanya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada prilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas

dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Istilah “kebijakan pendidikan” adalah terjemahan dari “educational policy”, yang tergabung dari kata education dan policy. Kebijakan merupakan seperangkat aturan, sedangkan pendidikan menunjuk kepada bidangnya. Jadi kebijakan pendidikan hampir sama artinya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.¹⁶ Kebijakan pendidikan disini dimaksudkan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama, keberpihakan tersebut menyangkut dalam konteks politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan, dan sebagainya. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

¹⁶ H. M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Ed. 1 Cet 1, hlm 40

2.2.2. Pemerintah

Pemerintah berasal dari suku kata “perintah” (to order) yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan atau sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Jadi pemerintah adalah badan, organ, atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dalam suatu negara. Sedangkan pemerintahan adalah keseluruhan aktivitas (tugas, fungsi, kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh badan, organ atau lembaga pemerintah demi tercapainya suatu negara.¹⁷

Menurut Finer dalam kuper pengertian pokok pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Dalam konteks itu, semua proses yang berlangsung dalam bingkai pengelolaan kekuasaan dipandang merupakan aktivitas yang menunjukkan pada performa pemerintah. Realitas ini dapat dilihat ketika seseorang menyadari bahwa semua aktivitas keteraturan dan ketertiban hingga urusan yang berbelit-belit dalam birokrasi merupakan mekanisme yang didesain secara sengaja oleh pemerintah. Pemerintah dipastikan kehadirannya untuk memenuhi tujuan mulia, yaitu terciptanya keteraturan sebagai apa yang kita istilahkan dengan terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum sosial order, Ketenteraman adalah suasana batin dari setiap individu karena terpenuhinyakebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), serta terbukanya peluang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya. Sedangkan ketertiban

¹⁷ Kahar Haerah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, hlm. 9

adalah situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan pada hukum, norma serta konsensus umum.¹⁸

Pemerintah menurut Sudirana merupakan organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, pendidikan, kenegaraan teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, pada umumnya Pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan yang dibuat pemerintah berdasarkan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak. Pemerintah dalam lingkup pengertiannya dibagi dalam dua jenis yaitu:¹⁹

- a. Pemerintah dalam arti luas : menunjuk pada aktivitas (tugas, fungsi dan kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Contoh : Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
- b. Pemerintah dalam arti sempit: menunjuk pada aktivitas (tugas, fungsi dan kewenangan) yang dilaksanakan secara terorganisir khusus oleh lembaga eksekutif.

¹⁸Dr. Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada:2014),hal 17

¹⁹ Ibid, hlm. 17

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama, oleh karena itu, secara umum tugas dan fungsi pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan, sebagai berikut:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat.
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintahan, atau yang lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintahan.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.

g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

2.2.3. Mutu Pendidikan

2.2.3.1. Definisi Mutu

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “mutu” berarti ukuran baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan).²⁰ Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan, antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi, agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (out put) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai setiap tahun atau kurun waktu lainnya.

Selain itu, juga terdapat beberapa definisi dari beberapa ahli tentang definisi mutu ini. Menurut Philip B. Crosby, Mutu adalah kesesuaian dengan apa yang disyaratkan atau distandarkan. Secara sederhana sebuah produk dikatakan

²⁰ Poewardaminta. W.J.S., Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta Balai Pustaka, 2003) hal 788

berkualitas/bermutu apabila produk tersebut sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan, yang meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.²¹

Sedangkan menurut Joseph Juran, mutu adalah kemampuan untuk digunakan atau *quality is fitness for use*.²² Dimana dapat diartikan bahwa mutu merupakan suatu kesesuaian atau kenyamanan suatu barang digunakan oleh seseorang. Selain itu indikasi dari barang yang bermutu adalah yang memiliki kekuatan, kehandalan, dan jaminan untuk digunakan.

Banyaknya definisi mutu yang dikarenakan konsep mutu sangat bergantung pada sudut pandang setiap orang. Dari pandangan para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mutu merupakan sesuatu yang sesuai dengan standar atau persyaratan yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau memberikan kepuasan pelangganyang diperoleh melalui manajemen yang baik dan berkelanjutan.

2.2.3.2 Definisi Pendidikan

Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

²¹ Noer Rohman dan Zainak Fanani, *Pengantar Manajemen Pendidikan* (Malang: Madani 2017), hal 205

²²Suryadi Prawirosentono, *Filosofi Tentang Manajemen Mutu Terpadu Total Quality Management Abad 21 Study Kasus dan Analisis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hal 5

keagamaan, pengendalian nilai, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.²³

Munandir juga berpendapat, bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang memfasilitasi seseorang untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan potensinya hingga mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang dikehendakinya melalui belajar.²⁴

2.2.3.3. Mutu Pendidikan

Mutu dalam pendidikan dapat dilihat dari segi relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, dapat tidaknya lulusan dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya bahkan sampai memperoleh suatu pekerjaan yang baik, serta kemampuan seseorang didalam mengatasi persoalan hidup. Mutu pendidikan dapat ditinjau dari kemanfaatan pendidikan bagi individu, masyarakat dan bangsa atau Negara. Secara spesifik ada yang melihat mutu pendidikan dari segi tinggi dan luasnya ilmu pengetahuan yang ingin dicapai oleh seseorang yang menempuh pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, mutu mengacu pada proses dan hasil pendidikan, menurut para ahli:

Menurut Hari Sudradjad pendidikan yang bermutu adalah Pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang

²³Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1

²⁴Ahmad Taufiq, "Pemikiran Pendidikan KH. Hasyim Asy'ari", Realita, Vol. 11 No. 1, (Januari, 2013), hal 4

keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill), pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (integrated personality) mereka yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal.²⁵

Menurut Aminatul Zahroh, mutu pendidikan merupakan kemampuan atau kompetensi lembaga pendidikan dalam mendayagunakan serta mengelola sumber-sumber pendidikan, yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik dengan seoptimal mungkin.²⁶

Selain itu menurut Marus Suti, mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstra kurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau penyelesaian pembelajaran tertentu. Berdasarkan pandangan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa mutu pendidikan adalah keunggulan atau kemampuan sistem pendidikan dalam mengelola dan memproses input pendidikan secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan output pendidikan yang bermutu dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.²⁷

²⁵Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, h. 56

²⁶Aminatul Zahro, *Total Quality Management Teori & Praktik Manajemen Untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal 28

²⁷Marus Suti, *Strategi Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan*, MEDTEK, Vol. 3 No. 2, (Oktober, 2011) hal 2

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, Sudarwan Danim meengatakan bahwa jika sebuah institusi hendak meningkatkan mutu pendidikannya maka harus melibatkan 3 faktor yang dominan, yaitu:²⁸

a. Guru

Secara umum guru adalah pendidik dan pengajar untuk penididikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Guru-guru ini harus memiliki kualifikasi formal. Perlibatan guru secara maksimal, dengan meningktakan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah. Ada beberapa tipe guru, yaitu: (1) guru tetap adalah guru yang telah memiliki status minimal sebagai calon pegawai negeri sipil dan ditugaskan di sekolah tertntu. (2) guru honorer adalah guru tidak tetap yang belum berstatus minimal sebagai calpn pegawai negeri sipil dan digaji secara sukarela. (3) guru tidak tetap adalah guru yang diangkat oleh kepala sekolah tanpa sepengetahuan pemerintah.²⁹

b. Siswa

Secara umum siswa adalah peserta didik yang menjadi suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak sebagai pusat” sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat mengiventarisir kekuatan yang ada pada siswa.³⁰

²⁸Hari Suderadjat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*, (Bandung: Cipta Lekas Garafika, 2005), hal 17

²⁹ Hamzah B. Uno dkk, *tugas guru dalam pembelajaran*, (jakarta: bumi aksara, 2016) hal 2

³⁰Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal 205

c. Sekolah

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang memerankan peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Keberhasilan semua program pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah sekolah sangat tergantung kepada ketersediaan sarana dan prasarana sekolah dan kemampuann guru dalam mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut.³¹

Dari pengertian dan penjelasan para ahli disimpulkan bahwa mutu pendidikan tidak hanya berada pada unsur masukan (input), tetapi juga proses, kinerja Sumber Daya Manusia yang mengelola, kreatifitas dan produktifitas mereka, terutama unsure keluaran atau lulusan (output) agar dapat memuaskan dan memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan. Dengan menggunakan konsep sistem maka input, proses, dan output yang ada dalam pendidikan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi untuk dapat mencapai kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

³¹Barnawi, Dkk, Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah, (Yogyakarta:2012: Hal 16

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Metode yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Sedangkan Penelitian merupakan terjemah dari kata research yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. jadi Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian berupa teknik yang digunakan, kerangka kerja menyeluruh yang kita gunakan untuk penelitian.³²

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dimana penelitian ini termasuk penelitian lapangan karena langsung berhubungan dengan objek yang Peran Pemerintah Terhadap Mutu Pendidikan Di Aceh Singkil, Pada penelitian ini juga menggunakan prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seorang atau kelompok terhadap sesuatu dengan berupaya mencari makna.³³

³²Dr.Drs. H. Rifa'I Abu Bakar, M.A, *Pengantar Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga 2021) hal 1

³³S. Aminah, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta Timur: PRENADAMEDIA Group,2019) hal 125

Tujuan utama penelitian kualitatif yaitu untuk mempermudah memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara pemaparan atau penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial yang ada, dimana penulis berusaha mencari informasi sesuai fakta lapangan.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini tentang Peran Pemerintah Terhadap Mutu Pendidikan Di Aceh Singkil. peran pemerintah sendiri diharapkan mampu untuk memperbaiki mutu pendidikan di Aceh Singkil.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Aceh Singkil.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber penelitian adalah suatu informasi dalam cara perolehan atas suatu fakta peristiwa yang memuat berita akan suatu fenomena yang sedang atau telah terjadi.³⁴ Sehingga dengan sumber akan memperkuat data perolehan atau hasil. Sumber data sangat penting untuk keperluan peneliti dalam melakukan proses penelitian.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang telah didapatkan dan diolah sendiri oleh peniliti yang didapat langsung dari subjek atau objek penelitian. Data primer dapat berupa:

³⁴Cooper, R Donald, C. William Emory. *Metode Penelitian Bisnis*, Alih Bahasa Gunawan, Iman Nurmawan, (Jakarta: Erlangga, 1999)h. 257

- Hasil wawancara
- Dokumentasi
- Dokumen resmi

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan bukan secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Data sekunder yang dimaksud mampu memberikan sejumlah keterangan untuk melakukan sebuah penelitian. data sekunder berupa:

- Profil pendidikan Aceh Singkil
- BPS
- Undang-undang
- Buku
- jurnal
- internet

3.5. Informasi penelitian

Informasi penelitian didapat dari orang yang menjadi sumber data untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian, sehingga dapat memberikan informasi sesuai dengan fakta yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan. Adapun informasi penelitian diperoleh dari:

Tabel 3.1
Informan penelitian

Informan	Jumlah
Kasubbag. Umum Dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Aceh Singkil	1
Kasi PTK PAUD, PTK DIKDAS dan Pendidikan (dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten aceh singkil)on Formal	1
Kasi Pengembang Model Penilaian Bidang Pendidikan (dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten aceh singkil)	1
UPTD SPF SD Negeri Sumber Mukti (kepala sekolah)	1
SMP N 1 Kota Baharu (kepala sekolah)	1
UPTD SPF SD Negeri 2 Singkohor (kepala sekolah)	1
SMP N 1 Singkohor (kepala sekolah)	1

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik triangulasi, yaitu gabungan dari berbagai tekni pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik dalam yaitu:

3.6.1 Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian. Kualitatif ini melibatkan manusia sebagai subjek (pelaku narasumber). Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh suatu informasi secara langsung dari orang yang melakukan (terwawancara).³⁵

3.6.2 Observasi

Setelah melakukan wawancara, peneliti melakukan observasi dimana yang peneliti lakukan dalam penelitian adalah observasi terstruktur. Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Observasi adalah metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³⁶

³⁵ Lexxy J, Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 224

³⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet.1, 2013, hlm. 143

3.6.3 Dokumen

Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kalamiah yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.³⁷ Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

3.6.4 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi. Baik data ini berupa catatan harian, memori, gambar, peraturan, kebijakan dan catatan penting.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan apakah benar penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang sudah diperoleh itu sudah valid maka perlu digunakan dalam teknik triangulasi sumber data dalam proses pemeriksaan data pada penelitian ini.

³⁷Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, Hlm. 86

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tahun 1999 yaitu dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 tahun 1999 tanggal 27 april 1999, Kabupaten Aceh Singkil adalah sebuah kabupaten yang berada di ujung barat daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Indonesia. Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada dikawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah yaitu daratan dan kepulauan, Kabupaten Aceh Singkil merupakan kabupaten memiliki presentase luas 1.858 km², Kabupaten Aceh Singkil terletak diantara:

- sebelah utara berbatasan dengan kota Sebulussalam,
- sebelah selatan berbatasan dengan samudra indonesia,
- sebelah timur berbatasan dengan provinsi Sumatra Utara, dan
- sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas km^2	Presentase
1	Pulau Banyak	15	1
2	Pulau Banyak Barat	279	15
3	Singkil	136	7
4	Singkil Utara	142	8
5	Kuala Baru	46	2
6	Simpang Kanan	290	16
7	Gunung Meriah	224	12
8	Danau Paris	206	11
9	Suro	128	7
10	Singkohor	160	9
11	Kuta Baharu	233	13
	Kabupaten Aceh Singkil	1858	100

Sumber: Data BPS (Maret 2022)

Pada Tabel di atas menunjukkan luas wilayah dan presentase menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil tahun pada tahun 2019. Dari tabel tersebut terlihat bahwa Kecamatan Simpang Kanan merupakan kecamatan terluas yaitu 290 atau sebesar 16% dari wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Sedangkan

kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pulau Banyak yaitu seluas 15 atau sebesar 1% dari luas Kabupaten Aceh Singkil.

4.1.1 Kondisi Sosial, Ekonomi, Masyarakat Aceh Singkil

Kondisi social ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara social dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemebrian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembaa status. Ekonomi sangat menentukan kehidupan seseorang, kabupaten Aceh Singkil penduduknya mayoritas memiliki mata pencaharian petani, nelayan, pedagang.

Kabupaten Aceh Singkil sebenarnya memiliki sumberdaya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan khususnya pada sektor pertanian. Kontribusi dari sektor pertanian menempati urutan pertama terhadap perekonomian Aceh Singkil yaitu sebesar 29,02%. Hasil dari sektor pertanian di Kabupaten Aceh Singkil ini sebagian besar disuplai dari subsektor perkebunan yakni sebesar 12,51%.³⁸ Adapun luas lahan dan produktivitas komoditas perkebunan yang paling tinggi adalah kelapa sawit, yakni dengan persentase luas lahan sebesar 60,74% dan persentase produktivitas sebesar 73,91%.³⁹

Pertanian juga merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan mata pencaharian utama dalam skala rumah tangga didominasi oleh rumah tangga perkebunan sebesar 42,24%.⁴⁰ Potensi sektor perkebunan juga didukung oleh keberadaan perusahaan kelapa sawit yang

³⁸BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2017

³⁹Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil

⁴⁰BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2017

memiliki pabrik pengolahan minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Secara teori, besarnya potensi perkebunan dan adanya kegiatan industri pengolahan kelapa sawit dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah.

Namun tingginya produktivitas komoditas kelapa sawit dan keberadaan perusahaan sawit tersebut belum memberikan perubahan, khususnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih tingginya persentase penduduk miskin menjadikan Kabupaten Aceh Singkil menjadi kabupaten Termiskin dengan presentase:

Tabel 4.2

Data persentase kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil

Tahun	Presentase
2017	22,11%
2018	21,25%
2019	20,78%
2020	20,20%
2021	20,36%
2022	19,18%

Sumber: Data BPS (Maret 2022)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa presentase kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa presentasi kemiskinan mengalami naik turun, terlihat bahwa pada tahun 2017 kabupaten Aceh Singkil

berada pada presentasi kemiskinan tertinggi dan tahun 2020 presentasi kemiskinan terendah dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi.

4.1.2 Profil Singkat Dinas Pendidikan Aceh

Budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam pada semua jenjang pendidikan. dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil terletak di Jl. Syekh Abdurauf Assingkili, No. 60 Pulo Sarok, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, yang dimana kantor tersebut masih berada dalam lingkungan kantor bupati kabupaten aceh singkil. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil didirikan sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Aceh Singkil nomor 8 tahun 2001 tentang susunan organisasi tata kerja dinas Pendidikan kabupaten Aceh Singkil.⁴¹

Pendidikan menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap manusia, sebab pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap jiwa yang tumbuh dan berkembang. Pemerintahan daerah selaku pembantu tugas pemerintah pusat untuk melakukan tugasnya di setiap daerah yang ditugasi dan diwenangi, berhak untuk membuat aturan yang khusus bagi setiap kelangsungan pelaksanaan ketatanegaraan di suatu daerah, untuk itu pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membuat kebijakan pendidikan dimana kebijakan itu merupakan proses yang dilakukan untuk membuat pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil menjadi lebih baik melalui langkah-langkah startegi pendidikan yang dijabarkan oleh dinas

⁴¹Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2001

pendidikan melalui visi dan misi. Adapun Visi dan misi dinas pendidikan aceh Singkil sebagai berikut:⁴²

Visi:

Terwujudnya Layanan Pendidikan Yang Kondusif Dan Berkualitas Dengan Guru Yang Kompeten Dan Inspiratif Serta Dukungan Warga Yang Peduli Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Mandiri Dan Berkepribadian.

Misi:

1. Mengoptimalkan Kinerja Aparatur
2. Meningkatkan Ketersediaan Dan Keterjangkauan Layanan Pendidikan
3. Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan
4. Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Islami
5. Meningkatkan Mutu, Relevansi Dan Daya Saing
6. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Pendidikan
7. Meningkatkan Kecintaan Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Sejarah, Seni Dan Budaya

Dalam pembentukan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas umum pemerintah, yaitu pembangunan kemasyarakatan dibidang pendidikan. Berdasarkan tugas tersebut, maka dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten aceh singkil memiliki Visi misi dinas pendidikan Aceh Singkil. Adapun motto dinas pendidikan dan budaya kabupaten aceh singkil adalah “bekerja dengan cepat tanggap, dan solutif”.

⁴²Hasil wawancara dengan Herri Sahputra, SH Kasubbag. Umum dan Kepegawaian,

Tabel 4.3**Jumlah Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Aceh Singkil**

Kecamatan	Jumlah sekolah SD Negeri dan Swasta	Jumlah sekolah SMP Negeri dan Swasta
Kec. Gunung meriah	25	11
Kec. Singkil	16	7
Kec. Simpang kanan	14	6
Kec. Singkil utara	7	3
Kec. Suro makmur	13	3
Kec. Kota baharu	9	4
Kec. Singkohor	7	4
Kec. Danau paris	9	4
Kec. Pulau banyak	4	2
Kec. Pulau banyak barat	4	2
Kec. Kuala baru	3	1
Jumlah	111	47

Sumber Data: BPS 2022

Pada tabel di atas menunjukkan jumlah sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten Aceh Singkil menurut kecamatan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa dikecamatan Gunung Meriah merupakan kecamatan yang memiliki sekolah SD terbanyak yaitu 25 SD dan 38 SMP. Sedangkan kecamatan yang memiliki sekolah

SD dan SMP paling sedikit yaitu di kecamatan Kuala Baru yaitu SD 3 sekolah dan SMP 1 sekolah.

4.1.3 Profil Pendidikan Aceh Singkil

4.1.3.1 Mutu Guru

Pendidik merupakan orang yang memiliki tugas utama mendidik, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Istilah pendidik mencakup pula guru, dosen, guru besar. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang dan hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang terdidik yang sudah disiapkan untuk menekuni bidang pendidikan. Sebagai profesi guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang disyaratkan bagi guru adalah sekurang-kurangnya S1/ D-IV mempunyai pendidikan sarjana atau diploma empat. Sedangkan kompetensi guru yang dipersyaratkan adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi atau guru tersertifikasi dan juga guru PNS. Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas pendidikan Aceh Singkil terkait upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Singkil sebagai berikut:

“Mutu guru di Aceh Singkil masih kurang mulai dari guru PNS, guru tersertifikasi maupun guru lulusan S1, ditambah sekolah yang semakin bertambah di Aceh Singkil, tapi kami akan terus berupaya dalam pemenuhan guru di Aceh Singkil, mulai dari mengadakan pelatihan-pelatihan yang ditujukan kepada tenaga pendidik demi terciptanya tenaga pendidik yang berkualitas yang nantinya tenaga

seperti pendidik di Aceh Singkil sangat dibutuhkan untuk menaikkan taraf pendidikan di Aceh Singkil. Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas pendidikan Aceh Singkil terkait kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Singkil sebagai berikut:

“Guru di Kabupaten Aceh singkil sendiri menurut kami masih belum memenuhi jika dilihat dari jumlah guru yang tersertifikasi dan PNS, namun untuk lulusan S1 kami rasa sudah memenuhi dan yang mengajar juga sudah rata-rata yang memang sudah memiliki ijazah S1, Kendala untuk peningkatan guru adalah banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan profesi dan keahliannya, dikarenakan ada beberapa factor seperti terkendala karena jarak sekolah sehingga tidak adanya guru di kecamatan tersebut karna factor jarak tempuh sehingga ada beberapa sekolah yang memang belum memiliki guru yang sesuai dengan bidangnya.”⁴⁵

Kurangnya tenaga pendidik di Kabupaten Aceh Singkil disebabkan oleh pendataan yang belum sesuai dengan data ataupun kondisi daerah yang menjadi factor utama saat ini. Kondisi daerah kabupaten Aceh Singkil yang cukup luas dan memiliki wilayah yang terdiri dari daratan dan kepulauan ini lah kondisi jarak tempuh, waktu tempuh, biaya tempuh, dan penumpukan tenaga pengajar di perkotaan sedangkan didaerah terpencil yang jauh minim akan pengajar, sehingga menjalani alasan kurang meratanya guru di Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu kepala sekolah di Aceh singkil yang menyebutkan bahwa:

“Menurut kami, Pemerintah saya yakin sudah berupaya dalam meningkatkan pendidikan di aceh singkil terkhusus dalam pemenuhan guru, seperti ketika kami berkeluh kesah kurangnya tenaga pengajar, pemerintah berupaya memberi bantuan guru jika

⁴⁵Hasil wawancara dengan Herri Sahputra, SH Kasubbag. Umum dan Kepegawaian 6 Agustus 2022

ada program guru dari pemerintah pusat, harapan kami sendiri terkait pendidikan Aceh Singkil ini lebih diperhatikan lagi sekolah-sekolah yang terpencil di aceh singkil ”.⁴⁶

Dengan kurangnya pemerataan tenaga pendidik di Aceh Singkil, Untuk itu, perlu adanya peningkatan mutu pendidikan terutama mutu tenaga pendidik. Hal ini karena pendidik menempati posisi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik untuk mendapatkan eksistensi fitrahnya.

4.1.3.2 Mutu Siswa

Pengertian siswa atau peserta didik menurut undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.⁴⁷ Secara Nasional di Indonesia adalah menerapkan kewajiban belajar 9 tahun, pada setiap daerah tergantung kesiapan dan kemampuan daerah yang dapat diatur pada perda masing-masing daerah. Wajib belajar sendiri adalah peraturan pemerintah (PP) no 47 tahun 2008 tentang wajib belajar yakni ketentuan mengenai pelaksanaan program wajib belajar yang diatur oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kewenangan memberikan sanksi administrative kepada warga Negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar. Untuk itu Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara

⁴⁶Hasil wawancara dengan Sumarno, S.Pd.,SD Kepala Sekolah SD Negeri Sumber Mukti. Pada tanggal 30 Juni 2022

⁴⁷Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas, (Bandung: Permana, 2006), h. 65.

Indonesia yang berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP/SMP secara merata. Dimana peraturan ini bisa meningkatkan kualitas SDA di Indonesia, supaya di zaman modern tidak ada anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah dan ada pula yang masih buta huruf. Sehingga sangat penting untuk merealisasikan tujuan tersebut di atas memerlukan kerja sama yang kooperatif antara Pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk membangun kehidupan masyarakat yang cerdas. Terkait dengan pentingnya pendidikan, hal yang serupa juga diungkapkan dalam hasil wawancaranya oleh salah satu kepala sekolah di Aceh Singkil yang menyebutkan bahwa:

“Pendidikan Sangat penting bagi anak-anak sekarang, sesuai dengan yang pemerintah wajibkan yaitu belajar 9 tahun, karena dengan belajar dan menuntut ilmu akan lebih mempermudah masa depan anak, kami menekankan anak-anak untuk dapat membaca yang paling penting, karena membaca adalah kunci utama manusia tidak dibodohi dikemudian hari, selain itu juga sebagai seorang guru tugas kami juga terus mendukung dan memberikan pembelajaran sebaik mungkin disekolah.”⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan untuk anak-anak sangat diperlukan dan wajib. ini bertujuan membangun karakter seseorang melalui pendidikan bisa memperoleh kehidupan yang dibutuhkan seperti bekerja dan kehidupan secara mandiri, pemberdayaan individu, menciptakan generasi muda yang lebih maju.

⁴⁸Hasil wawancara dengan Nurrahmah, S.Pd Kepala Sekolah SD Negeri 2 Singkohor. Pada tanggal 7 Juli 2022

Tabel 4.4
Hasil Ujian Nasional Sekolah SD Sederajat dan SMP
Kabupaten Aceh Singkil

Indikator	Kabupaten Aceh Singkil	Provinsi Aceh
% Nilai rata-rata Ujian Nasional tingkat SD Sederajat	40,44	44,36
% -rata Ujian Nasional tingkat SMP Sederajat	43,29	44,36

Sumber: kemdikbud 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase hasil ujian nasional sekolah SD dan SMP di kabupaten Aceh Singkil menunjukkan masih kurangnya capaian nilai. Hal ini disebabkan karena kurangnya profesionalisme guru pada bidangnya.

Selain itu untuk mempertegas bahwa pemerintah sangat mementingkan pendidikan seseorang dipertegas di UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam alinea keempat, yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 2 menegaskan kewajiban warga negara dan pemerintah di bidang pendidikan dasar, yakni setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dari beberapa paparan di atas bisa dilihat bahwa pendidikan bagi seseorang sangatlah diperhatikan oleh

pemerintah.Kabupaten Aceh singkil, tetapi dalam mewujudkannya tentu tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan maupun kendala yang harus diahadapi. Seperti yang telah disebutkan dalam hasil wawancara dengan dinas pendidikan Aceh Singkil yang menyebutkan bahwa:

“Tolak ukur kelulusan siswa sekarang bukan lagi dilihat dari nilai UN melainkan dari nilai rapor dan kelayakan siswa tersebut untuk diluluskan. Namun kami pemerintah akan terus memperhatikan perkembangan siswa sehingga kami terus mengetahui kendala dan mengusakan pemenuhan kebutuha sekolah untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. ”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kendala yang dialami siswa yaitu kurangnya tenaga kerja guru yang ada dan perlengkapan seperti sarana dan prasarana sekolah yang minim sehingga membuat siswa susah untuk fokus dalam kegiatan pembelejaran. Maka peran pemerintah sangat penting dan dibutuhkan untuk membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar yang juga berdampak dalam meningkatkan mutu pendidikan.

4.1.3.3 Mutu sekolah

Masalah pendidikan terutama terkait mutu sekolah mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah khususnya masih kurang mencukupi. Sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai segenap proses pengadaan dan penggunaan komponen-komponen yang secara langsung dan tidak langsung jalannya proses pendidikan yang disediakan berbentuk fasilitas (peralatan, pelengkap, bahan dan perabotan), pengelolaan sarana dan prasarana merupakan yang amat penting di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan, seperti; gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pengajaran, perpustakaan, ruang lab, dll. Dalam hasil wawancara

dengan salah satu kepala sekolah di Aceh Singkil terkait sarana dan prasarana menyebutkan bahwa:

“Dari sarana dan prasarana, guru, siswa harus saling terpenuhi, karena jika salah satu dari 3 tersebut tidak terpenuhi maka akan mengurangi proses pendidikan yang stabil”⁴⁹

Dalam proses pembelajaran, sebagai seorang pendidik tentunya membutuhkan adanya sarana dan prasarana yang mampu menunjang kegiatan pembelajaran peserta didiknya. Selain dari kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, dukungan sarana dan prasarana sangat penting dalam membantu guru. Semakin lengkap sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia akan memudahkan guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai akan mampu meningkatkan mutu pendidikan sekolah tersebut. Hal ini terjadi karena sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang pada kegiatan pembelajaran untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Dinas pendidikan sebagai fasilitator pendidikan tentu telah berkontribusi dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan terkait pembelajaran pendidikan. Hal yang menjadi persoalan terkait pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi mutu pendidikan, telah disebutkan dalam hasil wawancara oleh salah satu kepala sekolah di Aceh Singkil yang menyebutkan bahwa:

“Sejauh ini untuk mutu sekolah sendiri kami rasa masih belum terpenuhi, bukan karena pemerintah yang tidak memenuhi mutu

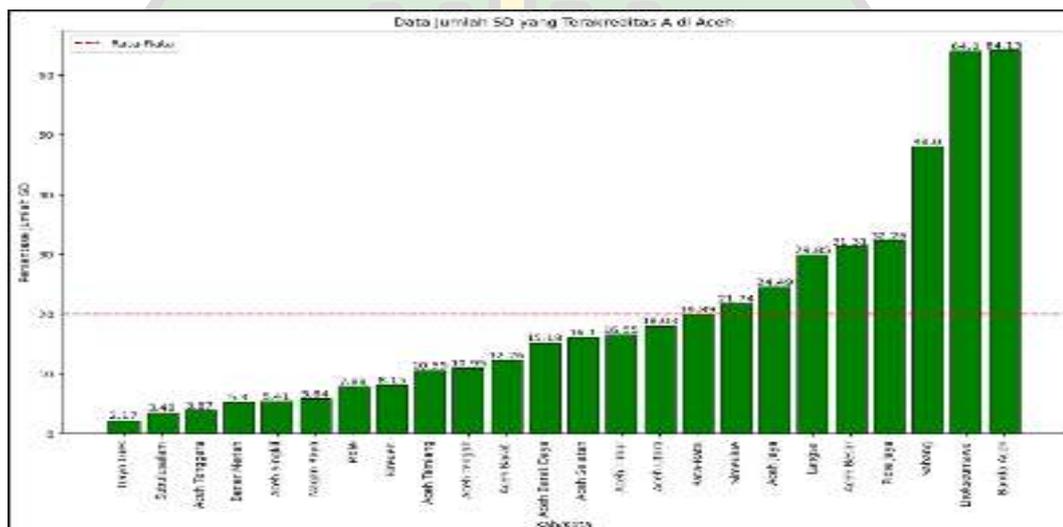
⁴⁹Hasil wawancara dengan Sumarno, S.Pd.,SD Kepala Sekolah SD Negeri Sumber Mukti. Pada tanggal 30 Juni 2022

pendidika, tapi lebih kepada lingkungan yang tidak mendukung sekolah ini berada disini”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, masih banyaknya sekolah yang belum terpenuhi sarana dan prasarannya yang sesuai, berikut data jumlah sekolah yang memiliki akreditasi yang baik di Kabupaten Aceh Singkil:

Grafik 4.3

Persentase sekolah SD yang akreditasi A



Sumber: Neraca Pendidikan Aceh Singkil 2022

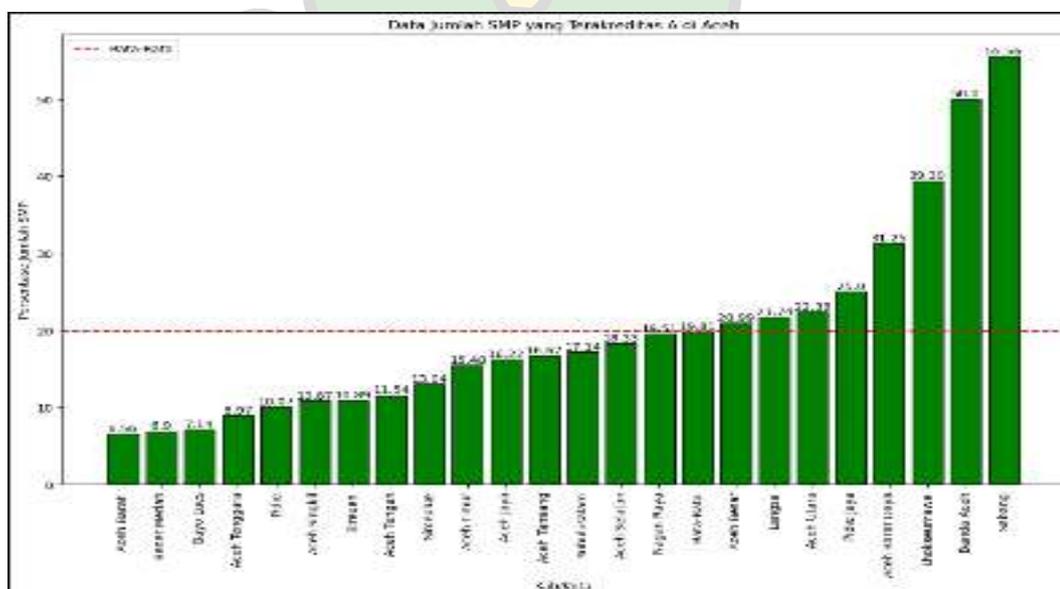
Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Aceh Singkil mencapai 111 Sekolah Dasar, dari jumlah tersebut hanya 5,41% sekolah yang memiliki akreditasi A, selain itu banyak sekolah Sekolah Dasar memiliki akreditasi B mencapai 60,36 %, akreditasi C 29,73 dan yang tidak terdata atau sekolah yang tidak layak atau buruk 4,50%, dan jika dilihat

⁵⁰Hasil wawancara dengan Arbiyanto, S.Pd.I Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Baharu. Pada tanggal 15 Juni 2022

bahwa jumlah sekolah sangat sedikit sekali mencapai akreditasi unggul. Disimpulkan bahwa dari jumlah tersebut bahwa masih kurang terpenuhinya sekolah yang memiliki fasilitas yang baik, karena masih banyaknya sekolah yang belum layak untuk proses belajar.

Grafik 4.4

Persentase sekolah SMP yang akreditasi A



Sumber: Neraca Pendidikan Aceh Singkil 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Aceh Singkil mencapai 47 SMP, dari jumlah tersebut hanya 10,87% sekolah yang memiliki akreditasi A, selain itu banyak sekolah Sekolah Dasar memiliki akreditasi B mencapai 43,48% %, akreditasi C 26,09% dan yang tidak terdata atau sekolah yang tidak layak atau buruk 19,56%, dan jika dibandingkan jumlah sekolah sangat sedikit sekali mencapai akreditasi unggul dan sekolah yang terakreditasi lebih banyak jumlahnya. Disimpulkan bahwa dari

jumlah tersebut bahwa masih kurang terpenuhinya sekolah yang memiliki fasilitas yang baik, karena masih banyaknya sekolah yang belum layak untuk proses belajar.

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Aceh Singkil sendiri menunjukkan bahwa masih banyaknya fasilitas sekolah yang belum memadai, seperti kurangnya gedung sekolah, kurangnya tidak adanya perpustakaan, lab, bahkan peralatan untuk belajar yang tidak ada, ini disebabkan karena factor lingkungan dan juga kurangnya pendataan yang tidak stabil. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap ketidaknyamanan proses belajar, ketidak layakan sekolah. Hal ini juga disebutkan oleh salah satu kepala sekolah di Aceh Singkil yang menyebutkan bahwa:

“Kami berharap pemerintah terus memperhatikan pendidikan di Aceh Singkil, meratakan pembangunan sekolah dan guru, kedua hal tersebut saat ini sangat di perhatikan semakin bagus kualitas guru dan sekolah maka mutu siswa akan terpenuhi, mulai dari mutu sekolah seperti bangunan sekolah dan fasilitas belajar mengajar.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka sangat diperlukan Fasilitas-fasilitas lainnya yang turut mempengaruhi mutu pendidikan ialah ketersediaan buku, dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, guna tercapainya mutu pendidikan.

⁵¹Hasil Wawancara dengan Mahyiddin, S.Pd Kepala Sekolah SMP N 1 Singkohor. Pada tanggal 7 Juli 2022

4.2 Peran Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Aceh Singkil

Terdapat langkah strategi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh melalui beberapa program sebagai berikut:

Tabel 4.5
Upaya Peningkatan Mutu Guru, Siswa, dan Sekolah

Mutu pendidikan	Peran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
mutu guru	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan wordshop untuk guru • Aplikasi Tolak Ukur Mutu Pendidikan Aplikasi Tolak Ukur Mutu Pendidikan, untuk melihat hasil belajar siswa atau hasil uji kompetensi guru namanyaaa “Cermin”
Mutu siswa	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan mutu tentang pembelajaran kurikulum merdeka untuk siswa. • Mengadakan program olimpiade dan cerdas cermat. • Hadiah Perlengkapan Belajar dan Uang Pembinaan Kepda Siswa-siswi Berprestasi.

	<ul style="list-style-type: none"> • Program beasiswa Indonesia Pintar. • menyelenggarakan Sayembara Literasi dan Numerasi secara Online bagi murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) • menggelar olimpiade sains rutin setiap bulan.
Mutu sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan alat penunjang PBM (perose belajar mengajar) terutama buku modul dan juga buku referensi. • Menyiapkan ruang laboratorium untuk praktik di bidang sains. • pemenuhan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Sumber: Data wawancara (2022)

Dari tabel di atas menunjukkan beberapa program dari pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang di berikan kepada Guru, Siswa, dan Sekolah untuk menjadikan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil lebih baik.

4.2.1 Meningkatkan Mutu Sekolah

Peran Pemerintah Aceh Singkil untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, telah dilakukan dengan membuat gebrakan baru dalam pendidikan dasar, kondisi nyata saat ini yang di hadapi bangsa salah satunya pemerataan pendidikan, penganan karakter, kualitas guru, muatan kurikulum dibuat lebih sederhana di setiap jenjang

satuan pendidikan, karena saat ini masih banyak sekolah dasar yang kurang layak atau belum mendapat hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Pada saat ini, sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa strategi atau upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Aceh Singkil seperti dalam meningkatkan mutu sekolah. Adapun Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas pendidikan menyebutkan bahwa belum layaknya sekolah-sekolah di Aceh Singkil sebagai berikut:

“Belum sepenuhnya sekolah di Aceh Singkil layak, namun kami selalu berupaya dalam memperbaiki dan menyediakan sarana dan prasarana untuk setiap sekolah di Aceh Singkil, karena semakin baik sarana dan prasarana akan membuat nyaman pengajar dan yang murid. Pembangunan sekolah.”⁵²

Dengan demikian hubungan yang membahas mengenai tentang pelaksanaan kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan di suatu daerah harus memandang banyak sisi hal baik atau buruknya pelaksanaan kegiatan tersebut di suatu daerah. Pemerintah maupun aktor diluar pemerintah harus memperhatikan proses, sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu sekolah pada suatu daerah karena prinsip utama pendidikan bagi manusia adalah untuk mengembangkan potensi setiap individu melalui proses pembelajaran yang nyaman dan aman.

Mengenai sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu sekolah, pemerintah Aceh Singkil telah melakukan pengelolaan sarana dan prasarana kegiatan tersebut sangat penting dilakukan bagi sekolah karena akan sangat

⁵²Hasil wawancara dengan Erlina Pengembang Model Penilaian Bidang Pendidikan . Pada tanggal 15 Juni 2022

mendukung terhadap proses belajar, dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah di butuhkan suatu proses bagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan dan pengawasan. jika Sekolah-sekolah di Aceh Singkil ingin berkembang harus memiliki kebutuhan yang diperlukan masyarakat, karena dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan terutama sarana dan prasarana. Berdasarkan wawancara peneliti dengan dinas pendidikan Aceh Singkil mengatakan bahwa:

“Dinas pendidikan kami rasa sudah berupaya memenuhi mutu pendidikan sudah berupaya, dengan membrikan fasilitas, walaupun belum terpenuhi semua, dan sudah meperhatikan sekolah dengan memberikan bantuan oprasinal juga.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dinas pendidikan telah berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan pendidikan di Aceh Singkil khususnya dalam memenuhi sarana maupun prasarana yang dibutuhkan demi menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.

4.2.2 Meningkatkan Mutu Guru

Manusia merupakan unsur paling diperlukan, karena program sekolah sangat di tentukan oleh orang yang melaksanakannya. hal tersebut harus benar-benar di sadari semua pihak sekolah, sehingga kemampuannya akan terus berupaya mengelola sumberdaya yang ada sekolah. Negara membutuhkan manusia yang pintar, oleh karena itu pemerintah mengupayakan membantu

⁵³Hasil wawancara dengan Sumarno, S.Pd.,SD Kepala Sekolah SD Negeri Sumber Mukti. Pada tanggal 30 Juni 2022

meningkatkan sumberdaya yang baik bagi sekolah serta masyarakat seperti peningkatan kualitas guru, karena guru merupakan ujung tombak pendidikan sebab secara langsung berupaya mempengaruhi, membina dan mengembangkan kemampuan siswa agar menjadi manusia yang cerdas, terampil dan bermoral tinggi. Mengelola kelas merupakan tugas guru untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal dan menetralsir keadaan jika terjadi gangguan di dalam kelas selama proses belajar mengajar. Guru sebagai tenaga pengajar juga tidak lupa untuk terus memotivasi siswa-siswa dengan memberikan dorongan arahan untuk terus berkembang dengan menambah pengetahuan pendidikan menjadikan siswa yang cerdas. Hal ini serupa dengan apa yang disebutkan dalam hasil wawancara oleh salah satu kepala sekolah di Aceh Singkil yang menyebutkan bahwa:

“Walaupun lingkungan tidak mendukung, kami selaku guru yang disini berupaya memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Disini juga masih banyak siswa setelah SMP tidak melanjutkan ke SMA, kami selaku guru terus memberikan dorongan, motivasi serta masukan untuk memberitahu mereka bahwa pendidikan itu penting, bukan hanya sekedar sekolah tapi menhhadapi kemajuan zaman yang terus berkembang.”⁵⁴

Guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pengembangan potensi yang di miliki peserta didik. Pada diri gurulah kejayaan dan keselamatan masa depan bangsa dengan penanaman nilai-nilai dasar yang luhur sebagai cicta-cita pendidikan nasional dengan membentuk keperibadian sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu haris mampu

⁵⁴Hasil wawancara dengan Arbiyanto, S.Pd.I kepala sekolah SMP N 1 Kota Baharu. Pada tanggal 15 Juni 2022

mendidik dalam berbagai hal, agar ia menjadi seorang pendidik yang profesional. Sehingga mampu mendidik peserta didik dalam kreativitas dan kehidupan sehari-harinya. Pemerintah memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan daerah. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu guru yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan dalam mendorong kemampuan mengajar guru. Hal ini seperti yang disebutkan dalam wawancara dengan dinas pendidikan Aceh Singkil yang menyebutkan bahwa:

“Kami akan terus berupaya dalam pemenuhan guru di Aceh Singkil, mulai dari mengadakan pelatihan-pelatihan yang ditujukan kepada tenaga pendidik demi terciptanya tenaga pendidik yang berkualitas yang nantinya tenaga pendidik mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas pula”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berupaya memperbaiki penataan dan pemerataan guru supaya membangun komitmen, meningkatkan kemampuan, dan kerjasama untuk pemetaan dan analisis kecukupan dan kebutuhan guru pada tingkat satuan pendidikan kabupaten dan kecamatan kebijakan dalam penataan dan pemerataan guru.

4.2.3 Meningkatkan Mutu Siswa

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan sangat mempengaruhi untuk memperbaiki serta meningkatkan mutu sumberdaya manusia. Dalam meningkatkan kualitas dan mutu

⁵⁵Hasil wawancara dengan Sampe Panjaitan, S.Kom Kasi PTK PAUD, PTK DIKDAS dan Pendidikan. Pada tanggal 5 Juli 2022

pendidikan maka hal utama yang sangat penting di lakukan adalah proses belajar. Belajar pada dasarnya adalah proses untuk memperoleh sesuatu yang di harapkan, namun dalam kenyataannya tidak semua proses belajar berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan mengalami masalah-masalah yang prinsip inilah yang disebut sebagai penyebab turunnya kualitas pendidikan, hal ini merupakan hambatan dalam mencapai hasil pendidikan maksimal dan efisien. Dengan adanya kualitas pendidikan setidaknya bisa memperbaiki mutu pendidikan sekolah, kualitas pendidikan tersebut menjadi lebih baik, banyaknya sekolah dasar yang rusak tersebut menyebabkan anak-anak usia pendidikan tidak merasa nyaman dalam proses pembelajaran.

“Salah satu faktor mengapa sekolah ini belum maju adalah karena faktor lingkungan, bukan karena pemerintah yang tidak memenuhi mutu pendidikan, tapi lebih kepada lingkungan yang tidak mendukung sekolah ini berada disini, karena menurut saya selaku kepala sekolah masyarakat dan murid disini cenderung belum maju dalam berfikir bahwa sekolah itu penting, yang kami harapkan untuk saling menjaga sekolah, malah mereka tidak peduli dan malah merusak bahkan mengambil beberapa peralatan sekolah. Jadi menurut saya bukan Cuma pemerintah dan guru yang penting untuk pendidikan namun juga lingkungan masyarakat juga penting.”⁵⁶

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa lingkungan masyarakat juga menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh Singkil. Siswa-siswa diharapkan agar lebih memperbaiki diri dengan menyadarkan bahwa pentingnya suatu pendidikan bagi mereka dan mereka selaku siswa dimana mereka

⁵⁶Hasil wawancara dengan Abriyanto, S.Pd.I Kepala Sekolah SMP N 1 Kota Baharu. Pada tanggal 15 Juni 2022

bersekolah harus dapat menjaga fasilitas-fasilitas di sekolahnya dengan tidak menghancurkan atau menjaga dengan baik fasilitas yang ada.

Peran pemerintah tidak dapat dipisahkan dan terus diperlukan dalam membangun kesadaran siswa untuk terus semangat belajar seperti dengan memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah akan pentingnya pendidikan dan terus membantu memfasilitasi belajar siswa dengan menyediakan buku paket yang sesuai kurikulum belajar siswa sehingga siswa dapat terus mengembangkan prestasi belajarnya menjadi lebih baik. Beberapa fasilitas lainnya yang mendukung semangat belajar siswa seperti adanya lab tempat belajar siswa dan gedung-gedung tempat olahraga siswa yang dapat membantu siswa agar lebih aktif dan cepat tanggap pada saat pembelajaran. Hasil wawancara dengan dinas pendidikan Aceh Singkil yang menunjukkan kurangnya fasilitas yang didapat siswa:

“Kendala siswa lebih ke tidak adanya guru dan perlengkapan sekolah yang kurang terkecukupi yang membuat siswa terkendala dalam proses belajar seperti kurangnya alat praktek dalam berolahraga, peralatan lab dan juga buku paket yang masih minim, dan sebaliknya ada sebagian sekolah yang sudah lengkap perlengkapan sekolah namun ada guru yang tidak sesuai dengan mata pelajaran.”⁵⁷

Dari hasil wawancara tersebut pemerintah diharapkan agar lebih aktif dalam memprioritaskan kebutuhan siswa khususnya dalam hal fasilitas perlengkapan sekolah agar manfaat yang dirasakan siswa dapat membantu siswa dalam menunjang prestasi belajarnya.

⁵⁷Hasil wawancara dengan Herri Sahputra, SH Kasubbag. Umum dan Kepegawaian. Pada tanggal 6 Agustus 2022

Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak, hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya. Dalam hasil wawancara lainnya dinas pendidikan lebih lanjut menerangkan bahwa:

“Sejauh ini yang kami lihat prestasi belajar siswa di Aceh semakin baik dari tahun ke tahun, kami berupaya memberikan fasilitas yang membuat siswa semakin minat membaca, seperti memberikan fasilitas ruang baca yaitu perpustakaan dan memberikan fasilitas buku yang memadai.”⁵⁸

Usaha meningkatkan mutu pendidikan khususnya dengan meningkatkan prestasi siswa menjadi salah satu tolak ukur peningkatan mutu pendidikan dan banyak mendapatkan sorotan. Arah dan tujuan peningkatan mutu pendidikan adalah untuk menghasilkan mutu lulusan yang memiliki kemampuan dan berkualitas. Kemampuan atau kualitas lulusan pendidikan itu bisa ditunjukkan dengan prestasi sekolah siswa yang dicapai. Dengan demikian, usaha meningkatkan mutu pendidikan pada dasarnya adalah meningkatkan prestasi sekolah. Prestasi siswa sebagai indikator mutu pendidikan, apabila prestasi siswa baik maka dapat dikatakan mutu pendidikan nya juga telah baik. Maka peranan penting pemerintah dalam memfasilitasi proses belajar siswa penting untuk dilakukan.

⁵⁸Hasil wawancara dengan Herri Sahputra, SH Kasubbag. Umum dan Kepegawaian. Pada tanggal 6 Agustus 2022

Alokasi dana khusus yang ada pada dinas pendidikan Aceh Singkil sudah direncanakan, tidak sekedar teknis. Dana yang didapatkan dari pemerintah dan bantuan lain yang mungkin di salurkan ke sekolah, diatur sedemikian rupa sehingga penggunaannya jelas dan terbuka seperti dalam menjamin kenyamanan belajar siswa. Dana-dana yang disalurkan harus mampu mencukupi kebutuhan seperti sarana dan prasarana pembelajaran siswa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dinas pendidikan Aceh Singkil terkait anggaran yang diberikan menyebutkan bahwa:

“Sumber anggaran yang ada pada dinas pendidikan dan kebudayaan kab. Aceh Singkil masih tergolong agak rendah yakni dana alokasi khusus (DAK) dan DOKA. Namun untuk realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten aceh singkil tidak terkendala. Karena semua kegiatan penyaluran masih dalam proses pengerjaan.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sumber anggaran yang ada saat ini masih rendah sehingga anggaran-anggaran tersebut belum mencukupi ke sekolah-sekolah di Aceh Singkil. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan belum mampu memenuhi kebutuhan dan harus ditambahkan lagi.

Dari beberapa penjelasan di atas mengenai upaya dinas pendidikan Aceh dalam meningkatkan pendidikan di Aceh Singkil dapat disimpulkan bahwa Seluruh upaya telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Singkil, pemerintah sedang berusaha terus dalam perbaikan pendidikan, seperti pemerataan guru, mutu siswa dan juga fasilitas sekolah yang masih

⁵⁹Hasil Wawancara dengan Mahidin Berutu, S.E Kasubbag. Perencanaan. Pada Tanggal 8 Juni 2022

tidak memadai. Usaha dan upaya yang terus dilakukan ini terbilang tidak mudah, karena kondisi wilayah yang luas dan kendala pendataan yang kurang, namun pemerintah kabupaten Aceh Singkil terus berupaya melakukan survey untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan yang lebih baik. Seperti hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil:

“Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil selalu berupaya dan komitmen terhadap pengelolaan pendidikan secara profesional merupakan hal yang utama, selain itu kami juga berupaya selalu dalam menganalisis dan melakukan perbaikan untuk menjadikan pendidikan di Aceh Singkil menjadi lebih baik, dari perbaikan mutu guru, mutu siswa, mutu sekolah baik sarana dan prasarana yang masih kurang dan belum berjalan baik di setiap sekolah.”⁶⁰

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Singkil selalu berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, mengingat pentingnya mutu pendidikan untuk kestabilan suatu daerah, karena mengingat majunya suatu daerah tergantung mutu pendidikan di daerah itu sendiri. Selain itu pentingnya kondisi lingkungan menjadikan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil harus lebih ekstra dalam menjalankan pemerataan mutu pendidikan dimana kondisi wilayah yang tidak semua bisa dijangkau, seperti dikecamatan pulau banyak, dimana kecamatan tersebut letaknya jauh dan jarak tempuh yang sulit, karena harus menyebrangi laut dimana pulau banyak berada ditengan pulau yang berada di Aceh Singkil sehingga menjadikan kecamatan tersebut masih minimnya mutu pendidikan. Namun pemerintah kabupaten Aceh Singkil selalu berupaya memberikan perhatian untuk mutu pendidikan tersebut.

⁶⁰Hasil wawancara dengan Herri Sahputra, SH Kasubbag. Umum dan Kepegawaian. Pada tanggal 6 Agustus 2022

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Aceh Singkil, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan di Aceh Singkil sangat membutuhkan perhatian salah satu faktor penting dalam mempengaruhi pendidikan adalah tenaga pendidik yang tidak memadai di setiap jenjang pendidikan di Aceh Singkil sehingga banyaknya sekolah yang memang masih sangat banyak kekurangan tenaga pendidik seperti guru yang belum tersertifikasi, guru PNS dan guru sudah S1 namun mengajar tidak sesuai bidangnya. Acuan Mutu pendidikan di Aceh Singkil terdiri dari mutu guru, mutu siswa, dan mutu sekolah. Dimana Mutu guru di Aceh Singkil masih tergolong rendah tercatat SD Sederajat 49,7% dan SMP 43,4%, Sedangkan Di Aceh guru PNS pada tingkat SD Sederajat memiliki 44,79% dan SMP 43,83%. Guru tersertifikasi pada tingkat SD Sederajat 27,2% dan SMP 20,9%. Sedangkan Di Aceh guru tersertifikasi pada tingkat SD Sederajat memiliki persentase 28,27% dan SMP 27,41%. Dan Guru lulusan S1 pada tingkat SD Sederajat 94,4% dan SMP 99,0%. Sedangkan Di Aceh guru tersertifikasi pada tingkat SD Sederajat memiliki persentase 94,04% dan SMP 98%. Mutu siswa di Aceh Singkil juga masih rendah

dilihat dari persentase pada tingkat SD Sederajat menunjukkan persentase 40,44% dan pada tingkat SMP memiliki persentase 43,29, Sedangkan Di Aceh memiliki persentase SD Sederajat 44, 36% dan SMP memiliki persentase sebesar 44,36%. Dan mutu sekolah menunjukkan bahwa terdapat kurangnya akreditasi dilihat dari persentase pada tingkat SD Sederajat 5,41% dan SMP 10,87%, Sedangkan Di Aceh memiliki persentase sebesar 19,89% pada tingkat SD Sederajat dan SMP memiliki persentase sebesar 19,81%. Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Singkil yaitu melalui program-program untuk mendukung pendidikan mulai dari sarana dan prasarana, membantu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) guru, meningkatkan kualitas pendidikan, proses pendidikan di Aceh Singkil, dan juga memberikan dukungan berupa program-program untuk menunjang meningkatnya nilai dan prestasi siswa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil agar lebih meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan khususnya pendidikan.
2. Peran pemerintah dalam mengupayakan peningkatan mutu harus lebih ditekankan lagi karena pemerintah sebagai fasilitator harus

mampu memenuhi apa yang dibutuhkan bagi pendidik maupun sekolah.

3. Kepada siswa untuk lebih dapat memaksimalkan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran siswa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ace Suryadi, 1999, Pendidikan Investasi SDM dan Pembangunan, Jakarta Balai Pustaka
- Ignas Kleden, 2004, Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan, Yogyakarta Penerbit Agromedia Pustaka
- Imam Gunawan, 2013 Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik , Jakarta Bumi Aksar
- Mustari Nuryati, 2015, Pemahaman Kebijakan Publik, Yogyakarta PT Leutika Nouvalitera
- Nanang Fata, 2012, Analisis Kebijakan Pendidikan, Bandung Remaja Rosdakarya
- Noer Rohman dan Zainak Fanani, 2017 Pengantar Manajemen Pendidikan Malang Madani
- Poewardaminta. W.J.S., 2003, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pustaka
- S. Aminah, dkk, 2019, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif Ilmu Politik, Jakarta Timur: PRENADAMEDIA Group
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002 Metodologi Penelitian, Bandung Mandar Maju

B. JURNAL dan SKRIPSI

- Ahmad Taufiq, “Pemikiran Pendidikan KH. Hasyim Asy’ari”, Realita, Vol. 11 No. 1, (Januari, 2013)
- Ahmad Taufiq, “Pemikiran Pendidikan KH. Hasyim Asy’ari”, Realita, Vol. 11 No. 1, (Januari, 2013)
- Aminatul Zahro, Total Quality Management Teori & Praktik Manajemen Untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)

- Arif, Dkk, 2021, Mewujudkan Kemandirian Indonesia Melalui Inovasi Dunia Pendidikan Cirebon: Insania Anggota IKAPI
- Atmanti Dwi Hastarini, 2005, Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan, Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol. 2
- Dr.Drs. H. Rifa'I Abu Bakar, M.A, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian, Yogyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga
- Hari Suderadjat, 2005, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK, Bandung: Cipta Lekas Garafika
- Hari Suderadjat, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK, (Bandung: Cipta Lekas Garafika, 2005)
- Marus Suti, 2011, Strategi Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan, MEDTEK, Vol. 3 No. 2, Oktober
- Marus Suti, 2011, Strategi Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan, MEDTEK, Vol. 3 No. 2, Oktober
- Muhardi, 2021, Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia, vol XX No. 4 Oktober-Desember
- S. Aminah, dkk, 2019, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif Ilmu Politik, Jakarta Timur: PRENADAMEDIA Group
- Suryadi Prawirosentono, 2004, Filosofi Tentang Manajemen Mutu Terpadu Total Quality Management Abad 21 Study Kasus dan Analisis, Jakarta: Bumi Aksara

C. Internet

- Aceh Jurnal Nasional Network, Sarjana Bukan Jurusan Keguruan Bisa Mendaftar PPL Guru di Aceh Singkil,, Diakses melalui situs: <https://www.ajnn.net/news/sarjana-bukan-jurusan-keguruan-bisa-mendaftar-pppk-guru-di-aceh-singkil/index.html>, diakses pada tanggal 7 maret 2022
- Namanya CERMIN, diakses melalui <https://www.penaaceh.com/2023/05/pemkab-aceh-singkil-buat-aplikasi-tolak.html>, pada tanggal 25 desember 2022

Pena Aceh, Pemkab Aceh Singkil Buat Aplikasi Tolak Ukur Mutu Pendidikan,

Serambinews, Potret Dunia Pendidikan di Aceh Singkil, diakses melalui: <https://aceh.tribunnews.com/2020/01/05/potret-dunia-pendidikan-di-aceh-singkil-mereka-terpaksa-menulis-sambil-jongkok-di-lantai-kelas>, pada tanggal 7 november 2022

Top Metro News, Pendidikan Rendah Menjadi Faktor Utama Aceh Singkil Miskin, Diakses melalui situs: <https://topmetro.news/71245/mutu-pendidikan-rendah-jadikan-aceh-singkil-kabupaten-termiskin/>, diakses pada tanggal 30 november 2022



LAMPIRAN 1

Pertanyaan Wawancara

- **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil (Kussubag. Umum dan Kepegaaian, KAI PTK PAUD, PTK DIKDAS dan Pendidikan, Pengembangan Model Penilaian Bidang Pendidikan)**
 1. Apa Visi dan Misi Dinas Pendidikan Aceh Singkil dalam meningkatkan mutu pendidikan Aceh Singkil?
 2. Apa saja kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh Singkil?
 3. Bagaimana hasil nila rata-rata ujian nasional Sekolah Dasar dan SMP apakah berkembang menjadi lebih baik atau sebaliknya?
 4. Apa saja kendala dalam meningkatkan nilai siswa di Aceh Singkil?
 5. Bagaimana dengan mutu guru di Aceh Singkil apakah sudah terpenuhi?
 6. Bagaimana dengan guru yang dengan kelulusan D-IV/S1, guru yang bersertifikasi dan guru yang terlatih, apakah sudah memenuhi untuk pendidikan Aceh Singkil?
 7. Berapa sekolah yang memiliki agreditas A,B,C?
 8. Apakah semua sekolah di Aceh Singkil sudah layak untuk menjadi tempat belajar?
 9. Bagaimana upaya pemerintah Aceh Singkil untuk menigkatkan pendidikan di Aceh Singkil sehingga bisa keluar dari situasi ini?
 10. Apakah masalah dana juga menjadi kendala untuk peningkatan mutu pendidkan Aceh Singkil?
 11. Apa harapan selanjutnya atau langkah selanjutnya yang akan diambil oleh dinas pendidikan Aceh Singkil untuk mutu pendidikan yang lebih membaik?

- **Sekolah (SD N 1 Sumber Mukti, SMP N 1 Kota Baharu, SD 2 Singkohor, SMP N 1 Singkohor)**
 1. Bagaimana dengan mutu pendidikan di sekolah ini, apakah sudah terpenuhi?
 2. Apa saja yang menjadi pokok permasalahan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan?
 3. Bagaimana cara atau upaya yang digunakan dalam memenuhi mutu pendidikan di sekolah ini?

4. Menurut Bapak/Ibu apakah Dinas Pendidikan Aceh Singkil sudah berupaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini?
5. Upaya apa yang menurut bapak/ibu yang perlu ditingkatkan/dilakukan dinas pendidikan untuk meningkatkan mutu sekolah?
6. Apa harapan sekolah untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam meningkatkan mutu pendidikan?

LAMPIRAN 2

• Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Masjid Abdur Raziq Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: (0652) 7277321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1251/Ur.08/TISIP-PP/00/9/05/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.
Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NINGRUM /180801050**
Semester/Jurusan : VIII Ilmu Politik
Alamat sekarang: Desa Sumber Mukti, Kecamatan Korā Bahaŕu, Kabupaten Aceh Singkil

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Terhadap Mutu Pendidikan Di Aceh Singkil**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Mei 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Berlaku sampai : 30 November
2022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1251/Un.08/FISIP/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.
SD N Sumber Mukti
SMP N 1 Kota Baharu
SD N 2 Singkohor
SMP N 1 Singkohor

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NINGRUM / 180801050**
Semester/Jurusan : VIII Ilmu Politik
Alamat sekarang : Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Terhadap Mutu Pendidikan Di Aceh Singkil**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Mei 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan.
A R - R



Berlaku sampai : 30 November
2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

- Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Syeh Abdurrauf Assingkil No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax: 21162
disdiksingkil@gmail.com

SINGKIL

Nomor : 420/ 315 /2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Singkil, 04 Juli 2022
Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
di -
Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Universitas Islam Negari Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Nomor : B-1251/Un.08/FISIP /PP.00.9/05/2022, tanggal 27 Mei 2022, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa untuk Skripsi kepada

Nama : NINGRUM
NIM : 180801050
Program Studi /Jurusan : Ilmu Politik
Semester : VIII (Delapan)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil menyatakan yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyusunan skripsinya yang berjudul : " PERAN PEMERINTAH TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DI ACEH SINGKIL "

2. Demikian di sampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya.

sp. Kepala Dinas, sp.

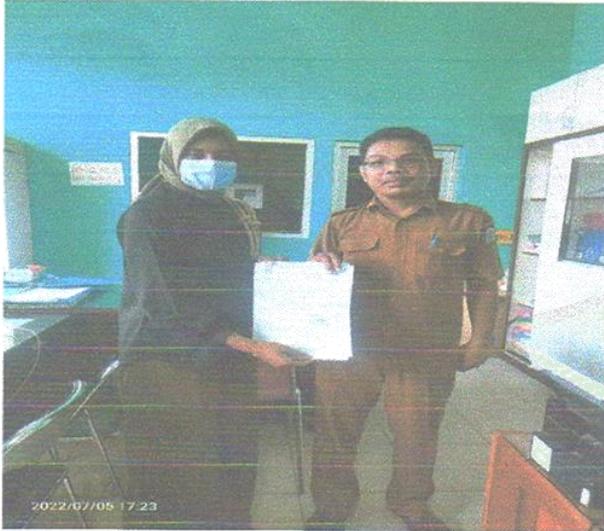
KRAMULLAH, S.Pd

Pembina TK / Nip.19700828 200212 1 003

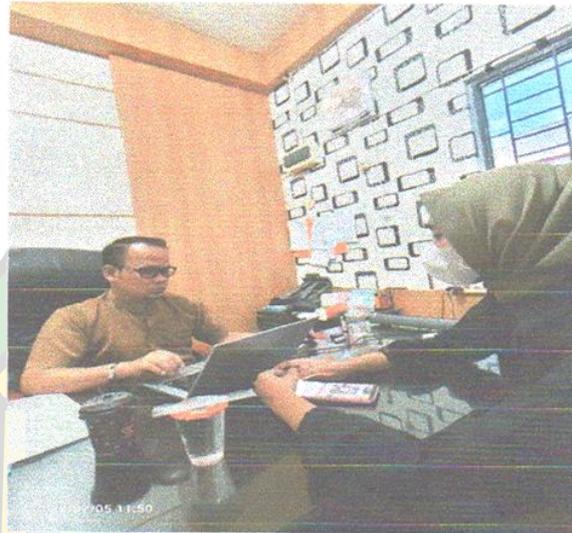
Tembusan :

1. Rektor UIN AR-RANIRY di Banda Aceh
2. Yang bersangkutan an. Ningrum

LAMPIRAN 3. Dokumentasi Wawancara



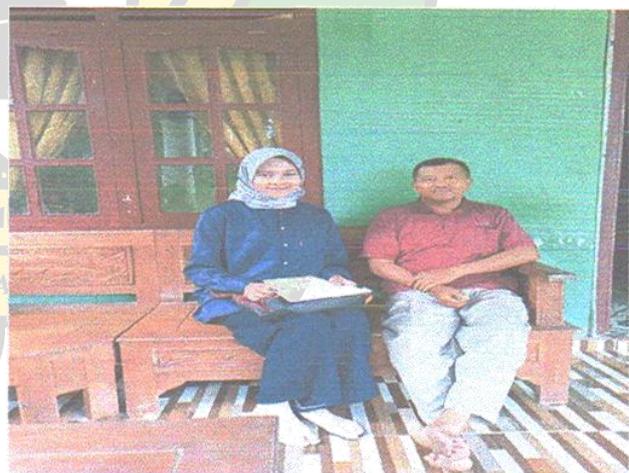
Wawancara dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil



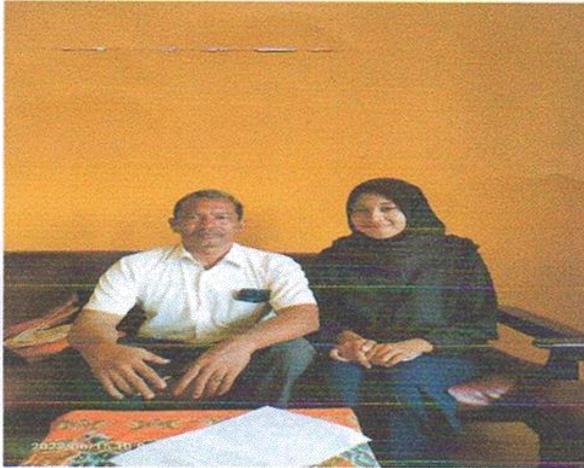
Wawancara dengan Kasi PTK PAUD, PTK DIKDAS dan Pendidikan



Wawancara dengan bidang pengembangan model penilaian bidang pendidikan



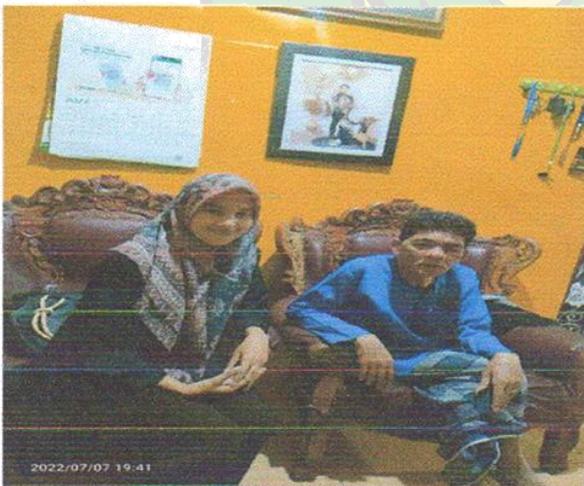
Wawancara dengan kepala sekolah SDN Sumber Mukti



Wawancara dengan Kepala sekolah SMPN 1
Kota Baharu



Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 2
Singkohor



Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1
Singkohor



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Ningrum
Tempat Tanggal Lahir : Sumber Mukti, 07 Februari 2000
Nomor Handphone : 082272290178
Alamat Aceh Singkil : Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharru, Kabupaten
Email : 180801050@student.ar-raniry.ac.id

Orang Tua

Ayah : Sabarudin
Ibu : Supriyati
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat Aceh Singkil : Desa Sumber Mukti, Kecamatan Kota Baharru, Kabupaten

Riwayat Pendidikan

1. SDN SP II Lentong
2. SMP N 1 Kota Baharu
3. SMA N 1 Singkohor